

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat pluralitas masyarakat yang sangat tinggi di dunia. Pluralitas masyarakat yang sangat tinggi itu ditandai dengan keberagaman suku, ras, etnis, budaya, dan agama. Pluralitas masyarakat mempertegas bangsa ini sebagai Negara puspa ragam. Pelbagai macam perbedaan baik itu suku, ras, etnis, budaya, dan agama mampu dirawat dan dipersatukan oleh Pancasila dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna berbeda-beda tetapi tetap satu secara implisit menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat pada dasarnya memiliki perbedaan baik secara suku, ras, etnis, budaya, maupun agama. Namun, setiap anggota masyarakat memiliki peran dan hak yang sama untuk mengutamakan sikap toleransi dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai Negara puspa ragam selalu hidup dalam keadaan rukun dan damai antar satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya meskipun acapkali terdengar riak-riak dan nada-nada sumbang terjadinya konflik agama, namun selama ini bisa diredam atas kesepahaman *Bhineka Tunggal Ika* yang sudah terpatris dalam jiwa manusia Indonesia.<sup>1</sup> Namun, usaha untuk terus menjaga kerukunan dan kedamaian di dalam hidup bermasyarakat mulai memudar dengan menguatnya praktik politisasi identitas sekelompok orang di perhelatan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah beberapa tahun terakhir ini.

Diskursus seputar politik identitas masih menjadi *tranding topic* di dalam konstelasi perebutan kekuasaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Meskipun tema tentang politik identitas itu sendiri kedengarannya telah usang di telinga, namun praksis politik identitas dalam ranah politik seakan-akan terus mengalami kebaruan. Realitasnya bahwa politik identitas memang

---

<sup>1</sup>Assyari Abdullah, "Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif", *Jurnal An-nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 41:2 (Riau: Desember 2017), hlm. 3.

masih menjadi alat politik yang mutakhir bagi elit politik menjelang musim kampanye baik di tingkat nasional maupun lokal. Fakta historis ini dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir ketika identitas etnis dan agama dipolitisasi untuk menyerang dan menjatuhkan lawan politik di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan presiden tahun 2019. Politisasi identitas etnis dan agama di perhelatan pilkada tahun 2017 berimplikasi juga bagi proses pemilihan presiden 2019. Implikasi dari politisasi identitas etnis dan agama pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ialah terbentuknya asumsi masyarakat untuk memilih pemimpin politik yang memiliki kesamaan etnis dan agama di tahun 2019.

Terbentuknya asumsi masyarakat untuk memilih pemimpin politik yang memiliki kesamaan identitas tidak terlepas dari aksi 212 umat Islam. Pasca gejolak kontestasi pilkada tersebut, alumni 212 mengadakan acara reuni. Reuni 212 merupakan sebuah langkah kapitalisasi agama dalam perjalanan panjang politisasi agama pada tahun politik.<sup>2</sup> Momentum mobilisasi massa yang sukses pada aksi 212 dimanfaatkan dengan melakukan reuni. Hal ini tidak terlepas dengan agenda politik tahun berikutnya di mana akan dilaksanakannya pilkada serentak 2018 dan elektoral presiden.<sup>3</sup>

Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan pilpres tahun 2019 merupakan dua peristiwa besar yang memiliki daya tarik tersendiri dan dapat dijadikan sebagai contoh untuk mengamati praksis politik identitas. Bahwasannya, politik identitas memainkan peran yang sangat besar dalam konstelasi perebutan kekuasaan di Indonesia. Praksis politik identitas di Indonesia secara historis bermuatan antara lain, etnis, agama, dan ideologi. Dalam konteks Islam sebagai identitas misalnya, agenda yang mereka perjuangkan di antaranya adalah menjadikan Islam sebagai ideologi utama dalam penyebaran gagasan.<sup>4</sup> Di samping itu juga, menguatnya narasi politik identitas di atas

---

<sup>2</sup> Irfan Prayogi dan Fernanda Putra Adela, "Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017", *Jurnal Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11:2 (Medan: Juli 2019), hlm. 33.

<sup>3</sup> Budi Kurniawan, "Politisasi Agama di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran di Indonesia dan Ancaman Bagi Demokrasi", *Jurnal Sosiologi Agama*, 12:1 (Yogyakarta: Juni 2018), hlm. 138.

<sup>4</sup> As'ad, *Politik Identitas dan Gerakan Sosial Islam (Studi Atas Front Pembela Islam)* (Tangerang: Transwacana Press, 2016), hlm. 6.

panggung politik dewasa ini tidak terlepas dari jatuhnya masa Orde Baru bersama kepemimpinan Soeharto.

Kejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998 itu, menjadi peluang bagi kelompok-kelompok yang memperjuangkan identitas mereka baik itu dalam bentuk partai politik maupun organisasi-organisasi berwajah Islam. Fakta ini diuraikan oleh As'ad dengan mengatakan bahwa; “dalam spektrum yang lebih luas, kelompok-kelompok identitas (dan ideologis) yang selalu ditekan selama masa kekuasaan Orde Baru mulai bangkit di mana-mana dan menuntut pengakuan atas eksistensi mereka dalam dan atas nama demokrasi.”<sup>5</sup> Setiap kelompok berupaya dan saling berebut pengaruh dengan menunjukkan identitasnya di ruang publik. Maka demokrasi dan reformasi menjadi sebuah euforia yang nyaris tanpa kendali dan tanpa arah hingga melabrak rambu-rambu konstitusi.<sup>6</sup> Patut dicermati bahwa, sejak Maret 1968, setelah Soeharto diangkat menjadi presiden isu tentang agama hampir tidak pernah muncul di dalam ruang publik maupun di atas panggung politik. Agama hanya muncul ketika digunakan untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah. Praktik indoktrinasi yang dilancarkan pemerintahan Soeharto menyebabkan kiprah agama pada tahun 1967-1990-an menjadi tidak jelas. Namun, setelah masa Orde Baru tumbang bersama kepemimpinan Soeharto praksis politik identitas menguat kembali di atas panggung politik.<sup>7</sup>

Pasca rezim Soeharto tumbang, relasi kekuasaan yang sebelumnya sentralistik diganti dengan politik desentralisasi. Politik desentralisasi atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memberikan peluang bagi semua kalangan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam membangun daerah masing-masing. Hal ini ditegaskan melalui pemberian otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999, dan mengalami pergeseran kembali di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004, dan Undang-Undang No 23 tahun 2014, dan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.7.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia”, *Jurnal MAARIF*, 13:2 (Jakarta: Desember 2018), hlm. 51.

terakhir Undang-Undang No 9 tahun 2015.<sup>8</sup> Pasca pemberlakuan otonomi daerah narasi politik identitas berbasis etnis, agama, dan ideologi politik semakin menguat di dalam perhelatan pilkada. Hal ini disebabkan oleh pelimpahan wewenang secara mutlak kepada masing-masing kepala daerah melalui otonomi daerah dipelintir untuk kepentingan elit politik lokal.

Fakta dan data historis yang tak dapat disangkal ialah pemberlakuan Perda Syariah di Aceh dan beberapa daerah lainnya dalam kebijakan Otonomi Daerah. Hal ini dilegitimasi oleh konstitusi, kemudian dijabarkan oleh instrumen hukum sampai kepada pengaturan khusus yang bersifat lokal.<sup>9</sup> Sejak tahun 2000-2014, tak kurang dari 155 Perda Syariah telah diterapkan di beberapa daerah.<sup>10</sup> Di antara perda-perda syariah itu, 61 bersifat umum sedangkan sisanya bersifat khusus.<sup>11</sup> Perda-perda yang bersifat khusus itu secara eksplisit berisi tentang pelbagai penerapan Syariah Islam di daerah. Perda-perda yang bersifat khusus itu bertemakan; kesalehan dan ketaatan terhadap Syariah Islam, pendidikan yang menyangkut baca tulis al Qur'an, Madrasah Diniyah dan kajian kesilaman, ekonomi yang berisi aturan-aturan penerapan Ziz (Zakat, Infaq, dan Shadaqah), arabisasi, yaitu menyangkut pemberian nama Arab terhadap anak dan penulisannya secara pegon.<sup>12</sup> Hasil riset dari PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2001 menunjukkan bahwa masyarakat yang menginginkan Syariah Islam sebesar 61%. Sementara 2002 naik menjadi 71%, dan tahun 2003 meningkat lagi menjadi 75%.<sup>13</sup>

Berkembangnya isu identitas etnis dan agama di atas panggung politik akibat kegagalan rezim Orde Baru menorehkan catatan cemerlang dan rekor buruk bagi bangsa Indonesia. Catatan cemerlangnya ialah, kejatuhan Orde

---

<sup>8</sup>Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia", *Jurnal Academia Praja*, 2:1 (Bandung: Februari 2019), hlm. 154.

<sup>9</sup>Kamarudin H. Dunggio dan Johan Jasin, "Validitas Peraturan Daerah yang Bernuansa Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh", *Law, Development, & Justice Review*, 2:2 (Universitas Negeri Gorontalo: Oktober 2019), hlm. 169.

<sup>10</sup>Ahmad Muhlasul, "Diskursus Pembangunan Manusia dalam Perda Syariah", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11:2 (Yogyakarta: April 2017), hlm. 6.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Khamami Zada, *Pemberlakuan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan* (Jakarta: LSIP, 2014), hlm. 5-6.

<sup>13</sup>Ma'mun Murod Al-Barbasy, *Politik Perda Syariah: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), hlm. 106.

Baru memberikan harapan hidup baru bagi masyarakat Indonesia melalui era reformasi dan sistem demokrasi yang transparan. Sedangkan rekor buruk yang dihasilkan akibat kejatuhan Orde Baru ialah menguatnya praksis politik identitas dalam skala yang cukup besar. Praktik politisasi identitas etnis dan agama yang masif baik di tingkat lokal maupun nasional dapat dipahami sebagai tindakan pemisahan diri antara masyarakat mayoritas dengan minoritas.

Dalam hal ini, masyarakat mayoritas secara etnis memiliki peran penting dalam proses pemungutan suara. Dalam skala yang lebih besar, etnis tidak hanya menjadi penanda pembeda identitas biologis dan kebudayaan semata, tapi juga menjadi penanda identitas politik, di mana kesamaan ras dan identitas budaya dikuatkan.<sup>14</sup> Isu etnis ini dapat disaksikan pada saat pilkada di Sulawesi Selatan tahun 2013 yang lalu. Black Campaign, “perang” baliho antarcalon dengan menggunakan idiom khas etnik tertentu dengan percaya diri memajang baliho dengan memajang terminologi khas Makassar.<sup>15</sup> Selain isu etnis ada juga isu agama. Isu ini muncul dalam penggunaan simbol-simbol atau kutipan-kutipan dari agama tertentu dan digunakan untuk menyerang lawan politik atau menjatuhkan tokoh politik lain. Isu seperti ini tengah populer dan kerap mewarnai perhelatan pilkada di beberapa daerah di Indonesia.

Politik identitas atau apa yang disebut sebagai biopolitik dan politik pembedaan merupakan persoalan klasik yang telah lama mengakar kuat di Indonesia. Sejak bangsa ini didirikan, diskursus tentang politik identitas telah nampak ketika para *founding father/mothers* merumuskan dasar negara yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang plural. Diskursus tentang dasar negara telah memecah belah para pendiri bangsa ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama hendak membangun dasar Negara yang berusaha mengayomi semua masyarakat Indonesia di bawah naungan Pancasila. Sedangkan kelompok

---

<sup>14</sup>Suaib Amin Pranowo, “Pilkada, Politik Identitas dan Kekerasan Budaya”, *Jurnal Renaissance*, 5:2 (Makasar: Agustus 2020), hlm. 653.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 656.

kedua hendak membangun dasar negara di bawah ideologi agama Islam.<sup>16</sup> Perselisihan pendapat pun tak terelakkan antara dua kelompok yakni, kelompok Soekarno dan kelompok Muhammad Natzir. Polemik seputar dasar Negara antara dua kelompok ini akhirnya berujung pada keputusan final untuk meletakkan dasar Negara Indonesia di bawah naungan Pancasila yang diusung oleh Soekarno.

Namun, identitas sebagai sesuatu yang melekat erat di dalam diri seseorang atau kelompok tertentu seolah-olah tidak bisa dihilangkan begitu saja. Artinya, identitas yang telah mengakar kuat ini masih bisa diperjuangkan demi tercapainya pemisahan diri antara masyarakat mayoritas dengan minoritas. Realitas ini dibuktikan melalui kiprah ormas (organisasi masyarakat) beridentitas Islam di tengah kehidupan bermasyarakat Indonesia. Dasar negara yang diusung oleh kelompok Muhammad Natzir perlahan-lahan menemukan kembali bentuk yang baku melalui organisasi-organisasi masyarakat berwajah Islam yang tampil di depan publik seperti; HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), dan FPI (Front Pembela Islam). Tidak sampai di situ saja, bahkan ada organisasi-organisasi masyarakat yang menyulap dirinya menjadi partai politik (parpol) seperti NU (Nahdlatul Ulama) yang dulu pernah menjadi Partai Nahdlatul Oelama (PNO).<sup>17</sup>

Kehadiran ormas bernuansa identitas agama ini pada dasarnya mendapat legitimasi dari Negara,<sup>18</sup> sehingga kiprah mereka di tengah masyarakat disambut dengan antusias dari masyarakat setempat. Dalam praksisnya ormas-ormas ini bisa melengserkan kelompok-kelompok minoritas yang berada di atas panggung politik maupun yang memegang status sosial lainnya yang berusaha menghalangi perjuangan mereka.<sup>19</sup> Melihat kiprah ormas-ormas

---

<sup>16</sup>H. Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Islami dan Nasionalis Sekular Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983) hlm. 3.

<sup>17</sup>Sumanto Al Qurtuby, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>18</sup>Mohamad Baihaqi, "Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir", *Jurnal Al MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 1:2 (IAIN PAREPARE: Desember 2019), hlm. 59.

<sup>19</sup>Anggi Afriansyah, *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Penerbit: Lipi Press, 2020), hlm. 146.

yang eksis kembali di tengah masyarakat itu, akhirnya menguatkan kembali kelompok-kelompok yang dulu sangat getol dalam memperjuangkan identitas Islam di dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pasca pemberlakuan UU No.22/1999 politik identitas semakin jelas wujudnya di ranah publik. Bahkan tidak sedikit pula aktor politik yang menggunakan identitas sebagai senjata yang ampuh dalam mengejar status sosial politiknya.<sup>20</sup> Politik identitas menjadi senjata yang sangat ampuh bagi para aktor politik, sebab politik identitas masih menjadi isu yang sangat sensitif di dalam masyarakat Indonesia. Banyak politisi yang telah menjadi korban dari politik identitas ini. Politisasi politik identitas yang memakan korban politisi lain yang masih segar di ingatan ialah pilkada (pemilihan kepala daerah) DKI Jakarta pada tahun 2017. Dalam perhelatan pilkada tersebut, identitas agama digunakan sebagai instrumen untuk menjatuhkan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Fakta empiris ini mengafirmasi dikotomi antara Soekarno dan Muhammad Natzir dalam meletakkan dasar Negara Indonesia sejak dahulu. Bahwasanya, identitas Islam memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia jika ditinjau dari perspektif agama.

Politik identitas yang terjadi di Indonesia sangat menekankan etnis, agama, dan ideologi politik. Fenomena ini tampak dalam kemunculan kelompok separatis seperti; Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).<sup>21</sup> Basis identitas etnis, agama dan ideologi politik ini merupakan tiga komponen penting dalam meraup keuntungan sekaligus memuluskan strategi politik para aktor politik. Etnis, agama, dan ideologi politik yang dipolitisasi sebagai instrumen politik menjadi *opium* para aktor politik dalam melancarkan agenda-agenda politik tertentu. Realitas politik identitas atas nama etnis, agama, dan ideologi politik yang disalahgunakan ini akhirnya menciptakan

---

<sup>20</sup>Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, dan Usni, "Politik Identitas dibalik Panggung Pilkadaes", *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2:2 (Banten: Oktober 2021), hlm. 31.

<sup>21</sup>Anna Yulia Hartati, "Separatisme dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)", *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 7:2 (Semarang: Juni 2010), hlm. 1.

perbedaan yang sangat jelas antara Islam dan non-Islam, mayoritas dan minoritas, serta superioritas dan inferioritas.

Hal ini menyebabkan disintegrasi antara masyarakat Indonesia dalam partisipasi politik mereka. Akibat lanjutnya, banyak politisi berkualitas yang tidak terpilih karena identitas mereka sebagai masyarakat minoritas. Dan juga politik identitas menyebabkan proses pilkada tidak berjalan secara bebas akibat adanya teror, ancaman, dan bahkan sampai pada tindakan kekerasan untuk saling meniadakan dalam memperebutkan kekuasaan dan tujuan tertentu.<sup>22</sup>

Praxis politik identitas yang menyebabkan kekerasan dalam medan perebutan kekuasaan pernah menjadi topik perbincangan serius bagi seorang Amartya Sen ketika ia mengamati kehidupan sosial di India yang penuh dengan kekerasan akibat konsep identitas yang banyak disalahpahami. Praktik penggunaan identitas tunggal sebagai upaya pemisahan diri dengan kelompok masyarakat yang lainnya menyebabkan aksi-aksi kekerasan terjadi di mana-mana. Berangkat dari pengalaman masa kecilnya, Amartya Sen pernah menyaksikan secara langsung kerusuhan Hindu-Islam pada tahun 1940-an-kerusuhan yang terkait dengan politik pemisahan atau penegasan identitas tunggal antara umat Hindu dan Islam dalam kehidupan sosial maupun agama.

Pada tahun 1998 Amartya Sen meraih penghargaan nobel di bidang ekonomi atas karyanya dalam ekonomi kesejahteraan. Menurut Sen, orang-orang yang menganut paham tentang identitas tunggal sangat sulit untuk bersikap toleransi. Sedangkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat plural sangat esensial. Amartya Sen seorang ekonom dan filsuf terpenting saat ini pernah mengatakan bahwa, “rasa keterikatan yang kuat (dan eksklusif) pada suatu kelompok bisa mengandung persepsi tentang jarak dan keterpisahan dari kelompok lain. Kesetiakawanan kelompok bisa memicu tumbuhnya perselisihan antar kelompok.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Mahpudin, “Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru”, *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 7:2 (Yogyakarta: November 2021), hlm. 152.

<sup>23</sup>Amartya Sen, *Kekerasan dan Identitas* (Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016), hlm. 4.

Bertolak dari realitas masyarakat plural seperti Indonesia yang selalu diwarnai oleh praksis politik identitas di perhelatan pilkada maupun pilpres, teori identitas Amartya Sen merupakan sebuah gagasan dasar untuk membangun kembali kesadaran kolektif masyarakat bahwa dalam masyarakat plural seperti Indonesia tidak mungkin menemukan identitas tunggal. Sikap fanatik terhadap pluralitas masyarakat dan ego individu atau sekelompok orang yang sangat tinggi untuk tetap mempertahankan ketunggalan identitas hanya mampu menghasilkan aksi-aksi kekerasan seperti radikalisme, terorisme, dan fanatisme.

Realitas politik identitas di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun dan didominasi oleh masyarakat mayoritas (Islam) menjadi hal urgen yang harus diberi perhatian secara serius agar tidak menyebabkan disintegrasi yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Dengan demikian penulis hendak mengangkat tulisan ini di bawah judul: **KRITIK TERHADAP REALITAS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA DALAM TERANG TEORI IDENTITAS AMARTYA SEN.**

Dengan teori identitas Amartya Sen, praksis politik identitas di tanah air dapat diminimalisir dengan upaya membangun kembali pemahaman yang benar tentang ketunggalan identitas sebagai sebuah ilusi seperti yang dikatakan oleh Sen. Artinya, kesadaran tentang sebuah identitas dalam masyarakat yang plural dapat menghindari tendensi privelese etnis dan agama tertentu dalam tatanan sosial masyarakat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sejauh mana teori identitas Amartya Sen berkontribusi bagi upaya menyikapi secara kritis realitas politik identitas di Indonesia?

Dari pertanyaan utama di atas, dapat dipetakan menjadi beberapa anakan pertanyaan yakni

- Siapakah Amartya Sen dan bagaimana teorinya tentang identitas?
- Bagaimana realitas politik identitas di Indonesia?
- Apa relevansi teori identitas Amartya Sen bagi pembangunan politik di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya merumuskan beberapa tujuan. Tujuan itu dibagi ke dalam dua bagian yakni, tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penulis ingin mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh persoalan politik identitas di Indonesia yang seringkali meminggirkan masyarakat minoritas dari tatanan sosial politik dan berusaha menemukan akar permasalahannya. Penulis juga ingin menelisik bagaimana kontribusi teori identitas Amartya Sen dalam meminimalisir politik identitas di Indonesia. Penulis ingin membangkitkan kembali memori kolektif masyarakat tentang identitas sejati dalam masyarakat plural seperti Indonesia.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

*Pertama*, sebagai usaha memenuhi sebagian dari persyaratan dan tuntutan akademik bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana Filsafat (S.Fil.) Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat Agama Katolik pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Flores.

*Kedua*, tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis penulis sebagai pribadi akademis.

### **1.4 Metodologi Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam metode ini, penulis sepenuhnya mencari pelbagai buku, literatur-literatur, jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang terbukti validitasnya yang memiliki hubungan erat dengan tema yang dialami penulis. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber lain yang mutakhir dewasa ini yaitu internet. Sumber ini digunakan oleh penulis untuk mengakses tema-tema aktual yang berhubungan dengan tulisan ilmiah ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab akan menguraikan tema yang membentuk satu kesatuan dari keseluruhan tulisan ini. Bab I, *Pendahuluan*. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang pemilihan

judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II, *Amartya Sen dan Teori Identitas*. Bagian ini meliputi penjelasan tentang Amartya Sen, dengan beberapa sub tema pokok seperti biografi dari Amartya Sen dan beberapa karya intelektualnya. Pada bagian ini dijelaskan juga tentang teori identitas. Bab III, *Gambaran Umum Tentang Politik Identitas di Indonesia*. Pada bagian ini juga dijelaskan pengertian politik identitas, jenis-jenis politik identitas, politik identitas menurut para ahli, dan realitas politik identitas di Indonesia.

Bab IV, memuat penjelasan tentang sejauh mana relevansi teori Identitas Amartya Sen bagi pembangunan politik di Indonesia. Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.